

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Zaeni. (2008). *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Damanik, Sehat. (2006). *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No .13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: DSS Publishing.
- Handoko, T.Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Cetakan Kedelapan Belas.
- Husni, Lalu. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Jhonny. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, Publishing. Cetakan ke-3.
- Jehani, Libertus. (2008). *Hak-Hak Karyawan Kontrak*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koentjoro, Diana Halim. (2004). *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Mardalis. (1998). *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-6.

- Muharam, Hidayat. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhajir, Noeng. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Samasin. Edisi III.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Manhar Maju.
- Priambada, Komang. (2008). *Outsourcing Versus Serikat Pekerja*. Jakarta: Alih Daya Publishing.
- Pain, Pan Mohamad. <http://www.blogger.com/navbar.g>. di akses Tanggal 10 Oktober 2009.
- Reksohadiprodjo, Sukanto., dan T.Hani Handoko. (2001). *Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Cetakan Ketigabelas.
- Simanjuntak, Payaman J. (2003). *Undang-Undang Yang Baru Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono (III). (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cetakan ke-3.
- Soerkanto, Soerjono., dan Sri Mamuji. (2004). *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetami, A.Siti. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triyanto, Djoko. (2004). *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.

- Tunggal, Imam Sjahputra. 2009. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.
- Utrecht. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Widjaja, Amin. (2008). *Outsourcing Konsep dan Kasus*, Jakarta: Harvarindo.
- Wijayanti, Asri. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wijayanti, Asri. (2011). *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Bandung: Lubuk Agung.
- Yasar, Iftida. (2012). *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus*. Jakarta: Pelita Fikir Indonesia.



Jurnal

Budiarti, Indah. (2008). *Serikat Pekerja*, [http://unionism.wordpress.com/serikatpekerja/Revised Edition/April-2008](http://unionism.wordpress.com/serikatpekerja/Revised%20Edition/April-2008)

Jurnal Hukum, *Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja di Perusahaan*, [http://www.makeproverty history.org](http://www.makeprovertyhistory.org). di akses tanggal 5 Juni 2009.

Iskandar, Muhaimin. *Pekerja Outsourcing dan Pekerja Kontrak Berhak Mendapat THR*. www.depnakertrans.go.id-news.html.49.naker diakses pada tanggal 27 Agustus 2013.

Yasar, Iftida. *Tekan PHK Dengan Bisnis outsourcing*. Sumber: <http://www.google.co.id/> diakses tanggal 5 Juni 2009



Peraturan/Undang-undang

Peraturan Menaker Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.

